

**Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan
Lembaga Sosial Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah**
*Going to Social Resilience Society through Local Social Institution
Empowerment in Central Kalimantan Province*

Etty Padmiati

Etty Padmiati, Peneliti Madya B2P3KS, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial. Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Yogyakarta
Telpon (0274) 377265. Diterima 29 Mei 2013, disetujui 7 Juni 2013.

Abstract

Local Social institution empowerment as an effort to enhance and uphold the role and its function to build societal resilience, through giving treatment and means to society that represented by several local institution public figures, which in this context local social institution in Telangah Village, Katingan Ilir Regency, Katingan Regency, Central Kalimantan Province. This research is meant to describe on the implementation of local social institution including its supporting and handicap factor. The researh method used is qualitative descriptive, to know the achievement of the local social institution through giving an action to 30 local public figures and village apparatus. The effectivity of this empowerment program known through a measure comparing between pre and post treatment condition. The result shows that the empowerment targeted society understand on social resilience that indicated through steting an action planning and working program per division or indication, namely social protection for people with social welfare problem division, societal participation on social organization division, conflict control, and local wisdom on natural and social resources management division. The implementation of the working program goes as agreed together. The supporting factor on the implementation of the empowerment is the local government apparatus and the commitment of local public figures. The handicap factor is the limited condition of the local society social resilience forum to collect community fund, to build relation with related institution and corporation, so the outsourcing fund and joint venture have not been implemented. It is recommended that societal resilience forum can be taken as a partner for technical unit and regency social agency to implement social welfare program. So that the forum having an ability to operate the organization and existing program, guiding figures of the forum need an ability establishment by related institutions.

Keywords:

Empowerment- Local Social Institution- Resilient Society

Abstrak

Pemberdayaan lembaga sosial lokal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan peran dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial, dengan memberikan perlakuan atau pembekalan terhadap masyarakat yang dipresentasikan oleh tokoh-tokoh dari berbagai lembaga sosial lokal dan tokoh masyarakat/aparat desa yang ada di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Ilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan lembaga sosial lokal, dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pemberdayaan, dengan memberikan perlakuan terhadap 30 orang wakil lembaga sosial lokal dan tokoh masyarakat/aparat desa. Efektivitas perlakuan ini dapat dilihat dengan mengukur kondisi kelompok (penerima perlakuan) sebelum dan setelah diberi perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran pemberdayaan paham akan ketahanan sosial masyarakat yang ditandai dengan disusunnya rencana aksi atau program kerja per divisi or indikator, yaitu divisi perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, divisi partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial, divisi pengendalian konflik, dan divisi kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Pelaksanaan program kerjanya tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah atau aparat pemerintah, dan juga kepedulian tokoh masyarakat. Faktor penghambat adalah keterbatasan Forum Tansosmas dalam menggali dana dari masyarakat, menjalin kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha, sehingga kerjasama dan penggalan dana dari luar belum dapat dilakukan. Rekomendasi yang diajukan adalah bahwa forum Tansosmas dapat dijadikan mitra kerja lapangan oleh unit teknis dan Dinas Sosial Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Agar forum tersebut memiliki kemampuan mengerjakan organisasi dan program kegiatan tetap berjalan, perlu pemantapan bagi tenaga pendamping oleh unit teknis terkait.

Kata Kunci:

Pemberdayaan-Lembaga Sosial Lokal- Masyarakat Berketahanan Sosial

A. Ketahanan Sosial Masyarakat dan Lembaga Sosial Lokal

Ketahanan Sosial Masyarakat telah menjadi isu kritis di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kecenderungan meningkatnya masalah sosial di lingkungan masyarakat. Isu ini tidak saja berpangkal dari makin pudarnya nilai kesetiakawanan sosial yang ditandai dengan merebaknya konflik sosial di berbagai daerah, tetapi juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial di lingkungannya termasuk rentannya kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai lokal, kemampuan melaksanakan penangkalan terhadap pengaruh eksternal serta kemampuan masyarakat dalam melakukan berbagai “perlawanan” terhadap penetrasi budaya asing yang menghancurkan keunikan lokalnya. Kerapuhan ini juga ditandai oleh tumbuhnya berbagai gerakan sosial masyarakat lokal yang mengarah pada gejala disintegrasi.

Disintegrasi sosial biasanya ditandai dengan terjadinya “*anomie*”, di mana nilai dan institusi yang ada tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi kegamangan dan orang-orang hidup dalam ketidakpastian. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia. Bentrok antar warga merupakan pemicu konflik yang paling sering terjadi, seperti pertikaian di Tarakan yang melibatkan kelompok keturunan Kalimantan dengan keturunan pendatang dari Sulawesi. Konflik tersebut telah menewaskan 5 orang dan melukai 6 orang dari kedua kelompok, serta menyebabkan sejumlah bangunan hangus dibakar (Kompas, 30 September 2010).

Demikian pula yang terjadi bentrokan antar warga (dengan isu agama) di Dusun Nangkerang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Madura. Bentrokan ini selain diwarnai terbakarnya 20 rumah warga, juga memakan korban 2 orang meninggal dan 5 orang lainnya terluka (Jawa Pos, 27 Agustus 2012).

Kasus lainnya adalah konflik sosial yang terjadi di Lampung Tengah, yaitu pertikaian antara warga Kampung Buyut Kecamatan Gunung Sugih dengan warga Desa Kusumadadi Keca-

matan Bakri. Konflik ini terjadi karena tindakan sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab (tindakan main hakim sendiri), sehingga Desa Kusumadadi yang dihuni warga Lampung transmigran keturunan Jawa, diamuk massa dari Kampung Buyut yang mayoritas dihuni warga Lampung *Ulun* (asli) (Kompas, 12 November 2012).

Masalah kemiskinan, disinyalir juga melemahkan ikatan kesetiakawanan sosial, sehingga perlindungan dan partisipasi sosial masyarakat saat ini terkikis dalam kehidupan dan penghidupan bermasyarakat. Kearifan lokal juga menipis dalam masyarakat, nilai dan norma agama serta budaya lokal terlihat luntur di masyarakat, sehingga ketidakpuasan aspirasi diungkapkan dengan demonstrasi yang diikuti oleh tindak kekerasan atau anarkis. Dengan kata lain, tekanan kemiskinan akhirnya membuat komunitas miskin frustrasi, dan kadang melanggar norma dan nilai yang masih berlaku dalam masyarakat.

Fenomena di atas memberikan gambaran betapa rentannya daya tahan sosial masyarakat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut. Untuk menguatkan ketahanan sosial suatu masyarakat perlu suatu upaya yang sistematis agar ketahanan sosial masyarakat tersebut menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Dengan kata lain, penguatan tersebut akan menjadikan masyarakat memiliki daya tahan yang kuat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi.

Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengatasi berbagai resiko perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya (Betke, 2002). Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Kemampuan di sini bukan hanya sekedar kemampuan bertahan, tetapi di dalamnya ada unsur dinamik, yaitu kemampuan untuk segera kembali kepada kondisi semula atau bahkan lebih baik lagi. Ketahanan sosial juga mengandung kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik. Jadi ketahanan sosial mengandung arti kemampuan untuk mengubah

ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan (Mu'man Nuryana, 2002).

Pemahaman ketahanan sosial lebih lanjut menegaskan bahwa, ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan komunitas atau lembaga sosial dalam memfungsikan modal sosial, sehingga: mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan, dan mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan.

Dengan demikian, ketahanan sosial masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang memiliki dua dimensi makna, yaitu ketahanan sosial dalam pengertian alat atau metode, dan ketahanan sosial dalam pengertian tujuan. Ketahanan sosial masyarakat sebagai metode atau alat, merupakan suatu rumusan dan model pendekatan ketahanan sosial yang dapat memberikan berbagai *input* dan *output* bagi upaya terciptanya suatu kondisi masyarakat yang berkemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta masyarakat yang memiliki suatu daya tahan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi. Sedangkan ketahanan sosial sebagai tujuan (*goal*) merupakan harapan-harapan ideal yang dapat diwujudkan dengan menggunakan cara atau metode, sehingga masyarakat menjadi dinamis, berkemampuan, memiliki daya tahan, memiliki daya juang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial, baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat (Zuhri Bahri, 2004: 10).

Jadi penguatan ketahanan sosial dapat diasumsikan dengan logika, jika ketahanan sosial pada masing-masing individu kuat, maka ketahanan sosial keluarga juga akan menjadi kuat dan berdaya. Demikian pula, jika ketahanan sosial keluarga kuat, maka ketahanan sosial masyarakat akan menjadi kuat juga. Pemahaman di atas mengindikasikan bahwa ketahanan sosial masyarakat dapat diwujudkan dan diupayakan menjadi kuat, jika individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan juga

lembaga sosial dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik di dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka sasaran dari pengembangan ketahanan sosial diarahkan pada lembaga sosial. Sebab, di dalam lembaga sosial terdapat sejumlah nilai dan norma sosial yang dihayati dan diamalkan bersama, sebagai upaya mewujudkan kerukunan dan kebersamaan antar lapisan masyarakat. Dengan begitu, keberadaan lembaga sosial memiliki arti dan posisi penting dalam membantu terciptanya keteraturan sosial (*social order*), sehingga struktur-struktur sosial dalam masyarakat mampu melakukan peran dan fungsinya dengan baik.

Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan lembaga sosial lokal sampai saat ini masih dipandang sebagai suatu sistem yang dapat mengatur keseimbangan bagi terciptanya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat masih berkeyakinan bahwa lembaga sosial merupakan salah satu modal sosial yang mampu melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman dan tantangan globalisasi. Lembaga sosial dalam konteks ketahanan sosial semakin menjadi bermakna penting dan strategis dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Prof. Djojodiguno (dalam Sugiyanto, 2002: 2) bahwa, lembaga sebagai ajang pemenuhan kebutuhan manusia.

Atas pertimbangan dan realitas di atas, maka pemberdayaan lembaga sosial (lokal) harus dilakukan secara komprehensif dan sinergis melalui pembekalan kelembagaan, dalam upaya mencapai masyarakat yang berketahanan sosial. Oleh karena itu, lembaga sosial (lokal) tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, melalui pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pemberdayaan lembaga sosial lokal dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut, penelitian ini dilakukan.

Kajian ini dilakukan di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Ilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan kriteria, antara lain : merupakan salah satu desa tertinggal, memiliki sejumlah lembaga sosial lokal yang secara potensial dapat didayagunakan dan diberdayakan sebagai agen ketahanan sosial, dan memiliki implikasi bagi menguatnya ketahanan sosial masyarakat.

Sasaran dalam penelitian ini adalah lembaga sosial lokal baik yang tumbuh secara tradisional di lingkungan masyarakat, maupun yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti : lembaga adat, Karang Taruna, PKK, BPD, Posyandu, Majelis Taklim/Gereja. Selain itu, tokoh masyarakat/aparat desa, dan juga dunia usaha. Adapun target sasaran garap yang akan diberi perlakuan sebanyak 30 orang, diambil dari atau mewakili masing-masing lembaga sosial lokal yang ada dan juga dari tokoh masyarakat/aparat desa.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pemberdayaan, yaitu dengan melakukan test untuk mengukur kondisi sasaran garap/kelompok (penerima perlakuan) sebelum dan setelah diberi perlakuan. Dari hasil inilah nantinya selain dilihat perkembangannya, juga akan dianalisis tingkat keberhasilan atau sebaliknya, sehingga akan dihasilkan suatu laporan yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Ketahanan Sosial Masyarakat dan Modal Sosial

Permasalahan sosial yang membentangi pada tataran empiris adalah fenomena sosial dari fakta sosial yang harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang tidak terelakkan. Ada beberapa kecenderungan kasus yang mengindikasikan terjadinya permasalahan sosial yang mengarah pada terjadinya krisis sosial, seperti: sedemikian mudahnya masyarakat terpancing untuk melakukan tindakan anarkis, kekerasan dan amoral, sedemikian mudahnya masyarakat untuk berkonflik, semakin menipisnya nilai dan sikap tolong menolong, solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial, dan semakin reng-

gangnya ikatan-ikatan sosial dan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Berbagai fenomena tersebut diyakini memberikan andil terhadap terciptanya kondisi rentan pada daya tahan sosial masyarakat, yang mengarah pada menurunnya ketahanan sosial masyarakat. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan akan semakin resistensinya daya tahan sosial masyarakat dan semakin rapuhnya ketahanan sosial suatu komunitas.

Dalam tulisan ini, konsep ketahanan sosial masyarakat mengacu pada hasil Diskusi Pakar tahun 2002 tentang, Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat, yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pusbangtansosmas) Jakarta. Hasil diskusi tersebut menggambarkan bahwa ketahanan sosial dapat dilihat dari perspektif luas dan sempit. Dalam pengertian luas, ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan hankam merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional. Sedangkan dalam pengertian sempit ketahanan sosial dipandang sebagai kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Konsep ketahanan sosial masyarakat yang mengacu pada hasil Diskusi Pakar tersebut, dimaknai sebagai kemampuan dari komunitas dalam mengatasi berbagai resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik yang mengelilinginya. Suatu komunitas dipandang memiliki ketahanan sosial apabila: Pertama, mampu secara efektif melindungi anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhi. Kedua, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan. Ketiga, mampu mengembangkan mekanisme kerja yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (Betke, 2002). Oleh karena itu, tinggi rendahnya ketahanan sosial suatu komunitas akan ditentukan oleh efektif tidaknya komunitas tersebut dalam melindungi anggotanya, menamakan investasi sosial dalam jaringan sosial, dan mengelola konflik dan kekerasan.

Pemahaman ketahanan sosial masyarakat lebih lanjut menegaskan bahwa, ketahanan

sosial masyarakat adalah kemampuan komunitas atau lembaga sosial dalam memfungsikan modal sosial, sehingga mampu melindungi kelompok rentan dan kurang mampu, mendorong masyarakat berpartisipasi dalam organisasi sosial, mencegah dan mampu mengelola konflik dan kekerasan, dan mampu melestarikan sumber daya alam dan sosial. Dalam konteks ini, modal sosial merupakan alat sekaligus potensi atau piranti sosial bagi lembaga dan komunitas untuk menuju suatu masyarakat yang memiliki ketahanan sosial yang tinggi. Dengan kata lain, ketahanan sosial masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah *outcome* dari lembaga sosial atau komunitas, di mana modal sosial yang di dalamnya terdapat jaringan sebagai *software* bekerja.

Dengan demikian, konsep ketahanan sosial ini sangat erat kaitannya dengan modal sosial (*social capital*). Menurut Rochman Achwan (2002: 73) dalam makalahnya yang berjudul Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia: Beberapa Catatan Empiris, secara umum modal sosial (*social capital*) diartikan sebagai aspek dari organisasi sosial, seperti norma, jaringan sosial dan kepercayaan sosial yang mendorong tindakan kolektif untuk mencapai tujuan dan manfaat bersama. Bentuk kongkrit modal sosial adalah kelompok sosial yang dibentuk sendiri oleh warga komunitas atau masyarakat. Sedangkan menurut Makmur Sunusi (2002: 94), modal sosial dapat didefinisikan sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur masyarakat yang membuat orang dapat bekerja sama (*connectedness*) dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, Narayan dan Woolcock (dalam Mu'man Nuryana, 2002: 6) mendefinisikan secara sederhana dan mudah dipahami tentang *social capital*, yakni norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang membuat orang bertindak secara kolektif. Lebih lanjut Mu'man menjelaskan, dari berbagai hasil studi banyak ahli mengemukakan bahwa, *social capital* memberikan kontribusi penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, *social capital* merupakan sebuah harta sosial yang patut dipelihara secara bijaksana, karena kontribusinya begitu baik bagi masyarakat.

Modal sosial secara sederhana dapat dimengerti dengan melalui pemahaman unsur-unsur yang terkait di dalamnya, seperti: kepercayaan (*trust*), jaringan (*networking*), nilai (*value*), dan komitmen. Unsur-unsur yang terdapat dalam modal sosial dalam kerangka ketahanan sosial memiliki arti dan fungsi yang strategis dalam mewujudkan suatu tatanan sosial yang teratur serta harmonis (Zuhri Bahri, 2004: 8). Dengan kata lain, unsur-unsur modal sosial diasumsikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketahanan sosial masyarakat. Dengan begitu, derajat ketahanan sosial ditentukan oleh tinggi rendahnya stok modal sosial, sehingga secara konseptual dapat dikatakan bahwa, untuk menciptakan ketahanan sosial harus diciptakan keberfungsian modal sosial. Terkait hal tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memfasilitasi lembaga atau komunitas, agar modal sosial mereka dapat berfungsi dengan baik dan dinamis dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga menghasilkan suatu ketahanan sosial yang tangguh. Dengan kata lain, apabila modal sosial ini digalang dan diasah melalui lembaga sosial lokal, diharapkan ketahanan sosial masyarakat semakin hari semakin meningkat.

C. Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal

Keberadaan lembaga sosial ditentukan oleh sejauhmana lembaga tersebut dapat bertahan serta dapat meningkatkan peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Oleh karena itu, perlu upaya yang sistematis dalam melakukan penguatan (*empowering*) kelembagaan dengan cara memberdayakan lembaga sosial sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Upaya pemberdayaan lembaga sosial pada dasarnya adalah upaya memberdayakan masyarakat. Dalam kaitan dengan hal ini, Payne (dalam Isbandi Rukminto Adi, 2003: 54) mengemukakan bahwa, suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek

hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar Teguh Sulistiyan, 2004: 77). Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan Wignyo Adiyoso (2009: 19) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan "*power*" (daya) kepada kelompok yang tidak berdaya/berkuasa, sehingga mereka menjadi "berdaya". Hal senada juga disampaikan Gunawan Sumodiningrat (2000), bahwa pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Mengacu pada pendapat-pendapat di atas, maka pemberdayaan pada dasarnya merujuk pada penguatan daya (*empowering*), yaitu peningkatan kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya (*powerfull*). Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan pemberdayaan lembaga sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan peran dan fungsi serta posisinya, sehingga dapat membawa masyarakat pada kondisi sosial yang lebih tertata secara proporsional. Dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan lembaga tersebut berkembang dengan baik.

Membahas tentang pemberdayaan lembaga sosial lokal, muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan lembaga sosial lokal?. Sebagaimana diketahui, di dalam kehidupan masyarakat biasanya akan muncul adanya berbagai wadah aktivitas hidup. Wadah sebagai tempat masyarakat beraktivitas dalam

rangka hidup bersama (berkelompok) disebut lembaga atau institusi. Jadi lembaga inilah yang akan mengorganisasi norma pengatur perilaku anggota masyarakat pada suatu aktivitas hidup tertentu dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Seperti dikemukakan Paul B Horton (dalam Sugiyanto, 2002: 25), lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisir yang ikut serta dalam perilaku itu. Oleh sebab itu, lembaga selalu mengarah pada norma-norma atau aturan-aturan. Jadi lembaga sosial adalah wadah investasi dan internalisasi norma sosial yang diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Lembaga sosial adalah suatu unsur dalam kehidupan dan pertumbuhan masyarakat yang terorganisir.

Secara teoritis, lembaga sosial terdiri dari lembaga keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut tentunya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama bagi anggota lembaga bersangkutan. Namun demikian, masing-masing lembaga tersebut tidak lepas dari dwi fungsi dasar, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes merupakan suatu fungsi yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga kehadiran dan tujuan lembaga diterima oleh masyarakat. Fungsi laten merupakan suatu fungsi yang tidak diharapkan atau ditolak oleh sebagian masyarakat, sebab lembaga memiliki tujuan yang terselubung.

Dalam perkembangannya, kemudian muncul istilah lembaga atau institusi lokal. Menurut Esman dan Uphoff (dalam Sugiyanto, 2002: 58), institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat, seperti rukun tetangga, arisan, kelompok pengajian, kelompok ronda. Institusi tersebut memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Sebagaimana pernyataan Purwo Santoso (dalam Sugiyanto, 2002: 58), bahwa ternyata institusi lokal mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal. Institusi lokal pada dasarnya adalah regulasi perilaku kolektif, sandarannya adalah etika sosial, sehingga institusi lokal mampu meng-

hasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kacamata normatif.

Secara empirik, lembaga sosial lokal yang ada dan berkembang di masyarakat pada kenyataannya ada yang bersifat formal dan informal. Ciri lembaga yang bersifat informal adalah terbentuk atas kehendak masyarakat bersangkutan, manajemen lemah, dinamika aktivitas tidak teratur, terbentuk atas norma dan nilai yang dikembangkan atas dasar *trust* (kepercayaan), pengurus dipilih lembaga, bersifat monoton, dan menolak campur tangan pihak luar. Contoh, lembaga lumbung padi di perdesaan dan lembaga sinoman. Ciri lembaga sosial formal terbentuk atas campur tangan pihak luar (pemerintah), ada dasar hukum untuk membentuk lembaga secara legal, pengurus dipilih atas pertimbangan kebutuhan dan masa kepengurusannya jelas, struktur bersifat formal dan mudah dipengaruhi oleh pihak luar (hegemoni). Contoh Karang Taruna, Dasa Wisma, kelompok tani wanita.

Secara konkrit, lembaga sosial lokal yang dapat diperankan atau diberdayakan dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat adalah organisasi atau perkumpulan yang terdapat dalam suatu lingkungan komunitas, baik itu yang bersifat formal maupun informal. Kehadiran lembaga sosial lokal ini bukan atas kepentingan individu, tetapi atas kepentingan bersama, sehingga lembaga sosial lokal lama kelamaan menduduki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Oleh karena itu, dengan pemberdayaan lembaga sosial lokal, termasuk mengembangkan modal sosial yang terdapat di dalamnya, diharapkan ketahanan sosial masyarakat semakin hari semakin meningkat. Apabila modal sosial digalang dan diasah melalui lembaga sosial lokal, ketahanan sosial suatu masyarakat yang didambakan dapat terwujud.

D. Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial.

Ketahanan sosial suatu masyarakat dapat terwujud, apabila lembaga sosial lokal yang di dalamnya terdapat modal sosial diberdayakan, sehingga lembaga tersebut dapat bertahan serta

dapat meningkatkan peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan lembaga sosial lokal merupakan suatu upaya untuk memberdayakan peran dan fungsi lembaga tersebut, termasuk di dalamnya upaya untuk melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga sosial lainnya. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong keberfungsian masyarakat secara kelembagaan. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara bersama-sama dalam penanggulangan masalah. Tumbuhnya suatu tindakan kolektif (sinergi) dari berbagai lembaga sosial lokal yang ada melalui kerja sama (sistem jaringan), akan sangat berpengaruh terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial yang dipandang memiliki keterkaitan dengan upaya penguatan ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, upaya pemberdayaan lembaga sosial lokal dilakukan di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Telangkah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa yang berada di ketinggian 125 meter dari permukaan laut ini memiliki luas 3.100 ha, yang sebagian besar wilayahnya merupakan hutan dan tanah kering, dan hanya 5.08 ha berupa tanah persawahan. Namun demikian, banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Banyak penduduk yang membuka lahan baru dengan membuka hutan untuk pertanian.

Berdasarkan monografi desa, penduduk Desa Telangkah sampai dengan bulan Februari 2012 berjumlah 2.552 jiwa terdiri dari 1.256 jiwa laki-laki dan 1.296 jiwa perempuan, dan terdiri dari 617 Kepala Keluarga. Dari jumlah penduduk tersebut, 1.820 jiwa (71,31 persen) dapat dikatakan sebagai usia produktif (15–56 tahun). Dari penduduk usia produktif tersebut, 1.709 jiwa (66,97 persen) telah tertampung dalam lapangan kerja, yang terbanyak adalah di bidang per-

tanian (21,40 persen), pertambangan (14,65 persen), dan swasta (12,30 persen).

Sedangkan ditinjau dari aspek pendidikan, secara umum memiliki tingkat pendidikan dasar (SD) dan menengah (SLTP dan SLTA), yakni 35,57 persen dan 43,92 persen. Meskipun demikian SDM yang dimiliki Desa Telangkah dapat dikatakan cukup baik, mengingat sudah ada penduduk yang mencapai tingkat pendidikan tinggi baik di akademi maupun perguruan tinggi, yakni 4,82 persen.

2. Sasaran Pemberdayaan

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan lembaga sosial lokal, maka yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah lembaga sosial di tingkat lokal, seperti organisasi sosial, keagamaan, adat, pemuda, wanita, dan lainnya. Peserta pemberdayaan merupakan perwakilan dari lembaga sosial yang dipilih oleh pihak aparat desa dan tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu dan memiliki komitmen untuk melakukan kegiatan dan mengatur personil serta administrasi. Jumlah peserta ditentukan sebanyak 30 orang.

Dari 30 orang peserta pemberdayaan, 6 orang berasal dari organisasi PKK, 4 orang dari Karang Taruna, dan 3 orang dari organisasi sosial. Kemudian yang termasuk tokoh masyarakat sebanyak 6 orang, BPD 1 orang, perangkat desa 2 orang, lembaga adat 1 orang, organisasi keagamaan 3 orang, dan kader posyandu 4 orang.

Hasil pendataan diketahui bahwa peserta pemberdayaan sebagian besar berusia antara 41–60 tahun (50 persen), kemudian terdapat 43,34 persen yang berusia antara 21–40 tahun, sedangkan yang berusia lebih dari 60 tahun ada 6,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pemberdayaan termasuk usia dewasa, dan hal ini berarti hanya sedikit kaum muda yang duduk dalam kepengurusan lembaga sosial lokal yang ada di desa Telangkah.

Dilihat dari pekerjaan peserta pemberdayaan sangat variatif. Terdapat separuh (50 persen) peserta yang bekerja di sektor

swasta, petani (26,67 persen), buruh (13,33 persen), aparat desa 6,67 persen) dan satu orang sebagai PNS (3,33 persen). Sedangkan untuk tingkat pendidikan dapat dikatakan cukup memadai karena ada separuh (50 persen) yang berpendidikan SLTA, bahkan terdapat 16,67 persen yang berpendidikan D3 dan S1. Sementara itu yang berpendidikan SD terdapat 10 persen.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan

Tahap Persiapan: Dalam tahap ini, kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi antara Tim Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta dengan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Katingan. Kegiatan ini selain untuk memperlancar terealisasinya kegiatan, juga untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait.

Langkah selanjutnya adalah menentukan peserta pemberdayaan sebanyak 30 orang, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, menentukan tim kerja atau panitya daerah (dua orang dari Dinsosnakertrans Kabupaten Katingan) yang akan membantu secara teknis pelaksanaan pemberdayaan demi kelancaran kegiatan. Selain itu, juga menentukan dua orang pendamping (PSM dan aparat Desa Telangkah) yang akan bertugas melaksanakan pendampingan, dan empat orang fasilitator yang bertugas memberikan pembekalan kepada para peserta pemberdayaan. Empat orang fasilitator tersebut, tiga orang dari Dinsosnakertrans Kabupaten Katingan dan seorang dari Bappeda Kabupaten Katingan.

Dalam rangka pemantapan terhadap para fasilitator dan pendamping, Tim B2P3KS Yogyakarta mengadakan pertemuan dengan tujuan: menyamakan persepsi di antara para fasilitator tentang materi yang akan disampaikan, menentukan metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam memberikan pembekalan, menyusun jadwal kegiatan secara bersama-sama. Pemantapan terhadap pendamping dimak-

sudkan untuk mempersiapkan pendamping dalam melaksanakan tugas pendampingan, dan juga menentukan sistematika pelaporan yang akan dibuat.

Tahap Pelaksanaan: Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan pemberdayaan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Katingan. Dilanjutkan oleh Tim B2P3KS Yogyakarta yang menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini. Kemudian, melaksanakan pengumpulan data awal dengan melakukan test (*pre-test*) kepada para peserta, untuk mengetahui pemahaman mereka tentang ketahanan sosial masyarakat.

Pembekalan kepada peserta dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana menjalin kerjasama dalam mengatasi atau menangani berbagai permasalahan sosial dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Namun, sebelum pembekalan dimulai terlebih dahulu dilakukan kegiatan Bina Suasana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana akrab antara fasilitator dengan peserta, dan juga antar peserta itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan peserta bersemangat dalam kegiatan ini, sehingga akan dengan mudah dan cepat menerima informasi-informasi baru yang akan membuka wawasan pengetahuan mereka. Selain itu, juga untuk menumbuhkan semangat bagi peserta untuk saling berbagi pendapat, mendengarkan masukan dari orang lain, sehingga secara tidak langsung peserta akan terbiasa dengan suasana seperti itu.

Dalam pembekalan ini, para fasilitator menyampaikan materi tentang: 1) Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 2) Partisipasi Masyarakat dalam Organisasi Sosial, 3) Pengendalian Konflik, dan 4) Kearifan Lokal dalam Mengelola Sumber Daya Alam dan Sosial. Kegiatan pembekalan awal difokuskan pada pemberian materi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Namun tidak dilupakan pula adanya diskusi untuk membahas materi-materi yang telah diberikan.

Review materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh para fasilitator. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan, apakah dapat dengan mudah diserap oleh peserta. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk melihat sampai sejauhmana peserta memahami materi-materi tersebut.

Kegiatan berikutnya adalah para peserta dibagi menjadi empat kelompok atau divisi sesuai dengan empat indikator ketahanan sosial masyarakat, yakni divisi perlindungan sosial, divisi partisipasi sosial, divisi konflik sosial, dan divisi kearifan lokal. Kemudian masing-masing divisi diminta untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya, dan selanjutnya memilih prioritas masalah sosial yang nantinya akan ditindak lanjuti melalui pemberdayaan.

Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan untuk membentuk wadah atau forum, yang dipandu oleh petugas. Dalam kesempatan tersebut disepakati membentuk wadah atau forum yang mereka beri nama Forum Tansosmas Hapakat. Untuk mengefektifkan kinerja forum, dilakukan pemilihan pengurus secara demokratis, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan empat divisi (sesuai dengan empat indikator ketahanan sosial).

Setelah forum terbentuk, selanjutnya menyusun rencana aksi (*action plan*) atau program kerja. Penyusunan program kerja tersebut meliputi empat indikator ketahanan sosial yang masing-masing divisi menentukan prioritas masalah yang akan ditangani untuk dapat dilaksanakan selama lima bulan ke depan. Rencana aksi tersebut disusun dalam suatu matrik program kerja yang meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana aksi "Forum Tansosmas Hapakat" untuk masing-masing divisi adalah sebagai berikut. Divisi Perlindungan Sosial, akan melaksanakan penanganan masalah kenakalan remaja, dengan penyuluhan masalah narkoba. Divisi Partisipasi Masyarakat, akan melaksanakan kegiatan dalam upaya membangkitkan/meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ke-

masyarakatan, seperti kerja bakti/gotong royong pembersihan jalan desa. Divisi pengendalian konflik, membantu aparat desa dalam menangani permasalahan lahan/tanah. Divisi Kearifan Lokal, pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dengan memberikan keterampilan

Sebelum kegiatan pembekalan selesai/berakhir, dilaksanakan pengumpulan data akhir dengan melakukan test (*post test*) kepada para peserta, untuk mengetahui pemahaman mereka tentang ketahanan sosial masyarakat, setelah mendapatkan pembekalan. Setelah selesai mengikuti kegiatan tes tersebut, kemudian masing-masing divisi mempresentasikan program kerjanya masing-masing. Untuk mendukung dan mendorong forum dalam mengimplementasikan program kerja yang telah disusun bersama tersebut, maka tim dari B2P3KS memberikan bantuan dana stimulan untuk tahap pertama sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan bagi kepentingan forum dan pengembangan program sesuai dengan tujuan yang dirumuskan bersama. Dengan kata lain, bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi kelangsungan kegiatan forum.

Monitoring: Kegiatan ini dilaksanakan setelah tiga bulan berjalan dari kegiatan pemberdayaan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan forum sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun bersama (tiga bulan sebelumnya). Dengan demikian, kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan oleh masing-masing divisi. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana stimulan.

Kegiatan monitoring ini dilaksanakan oleh petugas/tim dari B2P3KS. Kegiatan ini dilakukan dengan diskusi terfokus (FGD), yaitu mengundang kembali para peserta pemberdayaan yang telah membentuk forum untuk melihat kembali rencana aksi

(program kerja) yang telah mereka susun tiga bulan yang lalu. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan dana stimulan tahap kedua yang besarnya sama dengan bantuan tahap pertama, yaitu Rp 22.500.000,-. Berdasarkan hasil monitoring tersebut, diperoleh gambaran sebagai berikut.

Tidak ada penggantian personil Forum Tansosmas Hapakat, baik tentang pengurus maupun anggota. Forum Tansosmas Hapakat mengadakan pertemuan secara berkala untuk membicarakan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi forum. Dalam setiap pertemuan, pendamping forum (PSM dan aparat desa) selalu hadir. Rencana aksi (program kerja) yang telah disepakati bersama telah dilaksanakan dengan baik. Namun, dari tiga program kerja yang telah direncanakan tersebut, hanya dua yang telah dilaksanakan, yakni kerja bakti pembersihan jalan desa dan pelatihan keterampilan menganyam rotan. Sedangkan kegiatan penyuluhan tentang kenakalan remaja (masalah narkoba) belum terlaksana karena terkendala waktu (bersamaan dengan bulan puasa). Namun kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan setelah lebaran. Ada penambahan rencana program kerja baru, yaitu membuat keramba ikan nila (dua keramba) dengan memanfaatkan air sungai yang melintasi Desa Telangkah. Bantuan dana stimulan tahap pertama (Rp 22.500.000,-) telah digunakan sesuai dengan rencana program.

Evaluasi: merupakan kegiatan penilaian terhadap kegiatan forum, agar diketahui secara jelas apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai sesuai dengan rencana. Dengan kata lain, kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan. Selain itu, dengan kegiatan ini akan diketahui kendala-kendala yang dihadapi di dalam mekanisme pengelolaan kegiatan.

Sama halnya kegiatan monitoring, kegiatan evaluasi juga dilaksanakan oleh petugas/Tim dari B2P3KS setelah lima bulan kegiatan pemberdayaan dilakukan. Kegiatan ini juga merupakan tahap ter-

minasi yaitu “pemutusan hubungan” secara formal antara pemberi program (pelaksana pemberdayaan) yaitu Tim B2P3KS dengan komunitas sasaran (Forum Tansosmas). Selanjutnya, Tim B2P3KS menyerahkan “Forum Tansosmas Hapakat” kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Katingan untuk membina, memfasilitasi dan menjadikan mitra kerja dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayahnya.

Berdasarkan hasil pemantauan terakhir dapat diketahui bahwa, kinerja pengurus dan anggota Forum Tansosmas Hapakat dalam melaksanakan kegiatannya, cukup baik. Hal tersebut, selain karena rasa kebersamaan dan tanggungjawab pengurus dan anggota forum, juga karena keaktifan atau dukungan dari pendamping forum yang selalu memfasilitasi, membantu pemikiran dalam diskusi dan mengarahkan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk kegiatan yang dilakukan forum sudah dapat terealisasi dengan baik, bahkan kegiatan keterampilan menganyam rotan (membuat tudung saji) telah memberikan hasil, karena sudah ada yang laku dijual. Dengan terlaksananya berbagai kegiatan yang sudah diprogramkan, forum dapat melakukan perbaikan peningkatan pelaksanaan program seperti penanganan keluarga miskin, rumah tidak layak huni, dan bantuan bagi lanjut usia terlantar.

E. Faktor Berpengaruh dalam Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal

Faktor Pendukung: Dukungan pemerintah daerah atau aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan; Keterlibatan fasilitator secara tidak langsung merupakan jejaring kerja dalam rangka mendukung dan mengembangkan keberlangsungan kegiatan Forum Tansosmas; Kepedulian dan partisipasi tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan forum Tansosmas; Respons positif masyarakat dengan mendukung

keberadaan forum Tansosmas di wilayahnya.

Faktor Penghambat: Kurang aktifnya beberapa pengurus dan anggota dalam kegiatan forum Tansosmas, karena kesibukan mereka mencari nafkah (mencari tambahan penghasilan di luar kabupaten); Keterbatasan forum Tansosmas dalam menggali dana dari masyarakat, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang pada umumnya kurang mampu; Masih kurangnya kemampuan forum Tansosmas dalam menjalin kemitraan atau jejaring kerja dengan institusi terkait dan dunia usaha, sehingga kerjasama dan penggalan dana dari luar belum dapat terlaksana.

F. Rangkuman

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan kemampuan pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga perlu memaksimalkan kemampuan dan potensi masyarakat sebagai salah satu alternatif.

Upaya memaksimalkan kemampuan dan potensi masyarakat melalui cara menyatukan potensi-potensi dengan cara membangun kerjasama antar lembaga sosial lokal yang ada di lokasi penelitian (Desa Telangkah). Terbangunnya kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan kekuatan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial, sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan sosial masyarakat.

Untuk membangun kerjasama antar lembaga sosial lokal sebagai upaya mewujudkan masyarakat berketahanan sosial, maka dilaksanakan pemberdayaan dengan memberikan pembekalan terhadap 30 orang peserta yang merupakan perwakilan dari lembaga sosial lokal yang ada di desa Telangkah. Tujuan pembekalan adalah menyamakan persepsi di antara peserta, membangun komitmen di antara peserta, dan mewujudkan aksi bersama.

Setelah kegiatan pembekalan dan dilakukan *test (pre test dan post test)*, diketahui bahwa pemahaman peserta pemberdayaan terhadap empat indikator ketahanan sosial masyarakat cukup signifikan, yang ditandai dengan disusun-

nya rencana aksi per divisi/indikator, yaitu divisi perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, divisi partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial, divisi pengendalian konflik, dan divisi kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Dalam melaksanakan program kerjanya, telah berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama.

Kerjasama antar lembaga sosial lokal tersebut akan efektif dan memiliki kemampuan sosial untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial, apabila dibentuk suatu komunitas baru yang beranggotakan perwakilan lembaga sosial lokal yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Berdasarkan kesepakatan bersama maka dibentuklah Forum Tansosmas Hapakat yang memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan empat divisi (sesuai dengan empat indikator ketahanan sosial).

Terbentuknya "Forum Tansosmas Hapakat" mampu menyusun rencana aksi (*action plan*) atau program kerja untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, yakni perlindungan sosial (penanganan masalah kenakalan remaja; dengan penyuluhan masalah narkoba); partisipasi masyarakat (melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti kerja bakti/gotong royong pembersihan jalan desa); pengendalian konflik (membantu aparat desa dalam menangani masalah lahan tanah); dan Kearifan lokal (pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dengan memberikan keterampilan).

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim B2P3KS, maka rencana aksi atau program kerja yang disusun bersama telah dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Terlaksananya rencana aksi tersebut selain karena adanya komitmen semua anggota forum, juga karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah atau aparat pemerintah. Seperti dalam melaksanakan pelatihan keterampilan menganyam rotan, Dinas Perindustrian Kabupaten menyediakan pelatih untuk membimbing para peserta. Demikian juga, dinas terkait memberi-

kan bantuan bibit ikan nila untuk usaha keramba ikan nila. Sedangkan untuk kerja bakti pembersihan jalan desa selain melibatkan aparat desa juga melibatkan tokoh masyarakat, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa.

Meskipun pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah atau aparat pemerintah, dan juga adanya kepedulian tokoh masyarakat. Namun, tidak dipungkiri adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan forum dalam menggali dana dari masyarakat. Selain itu, belum mampu menjalin kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha, sehingga kerjasama dan penggalan dana dari luar belum terlaksana.

Mengingat Forum Tansosmas mampu menyusun rencana aksi (*action plan*) atau program kerja untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, maka forum tersebut dapat dijadikan mitra kerja lapangan oleh unit teknis dan Dinas Sosial Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, agar forum memiliki kemampuan menggerakkan organisasi dan program kegiatan tetap berjalan atau eksis, maka perlu pemantapan bagi tenaga pendamping oleh unit teknis.

Pustaka Acuan

- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemiskinan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Betke, Friedhelm, 2002. *Statistik Ketahanan Sosial : Menuju Operasionalisasi Konsep Baru Dalam Bidang Statistik Sosial*, Makalah Diskusi Pakar tentang Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat. Jakarta : Pusbangtansosmas.
- Ginjar Kartasasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Dides.
- Gunawan Sumodiningrat, 2000. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Program Kegiatan*. Jakarta: Per Pod.
- Isbandi Rukminto Adi, 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan*

Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mu'man Nuryana, 2002. *Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Pusbangtansosmas.

Rochman Achwan, 2002. *Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia : Beberapa Catatan Empiris*. Makalah Diskusi Pakar tentang Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat. Jakarta: Pusbangtansosmas.

Wignyo Adiyoso, 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Zuhri Bahri, dkk, 2002. *Jaringan Strategis Pranata Sosial. Pengembangan Pola dan Penguatan Ketahanan Sosial*. Jakarta: Pusbangtansosmas.

Sugiyanto, 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Sumber lain :

Kompas, 30 September 2010, *Mereka Bersatu di Pengungsian*.

Jawa Pos, 27 Agustus 2012, *Musibah Agama Nodai Sampang*.

Kompas, 12 November 2012, *Bekri Berangsur Pulih, Konflik di Lampung Tengah. Tindakan Perseorangan*.